

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendapatan Pajak Hotel

1. Pengertian Pendapatan Pajak Hotel

Salah satu Negara pastilah terdapat pemerintah yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintah diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintah tersebut. biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam satu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut sudarsono pajak adalah iuran kepada Negara yaang dapat dipaksakan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.¹

Berbagai cara dilakukan Pemeritah Daerah Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah bagi pelaksanaan kegiatannya. Pertama, Pemerintah Derah Kabupaten dan Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikata gorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

¹ Betty Rahayu, *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul*, (Universitas: Diponegoro, 2011).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, oleh Ahmad Yani Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.²

Manajemen pendapatan, menurut Mahmudi meliputi 5 tahapan, yaitu :

1. Identifikasi sumber pendapatan
2. Administrasi pendapatan

² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 2013), 51

3. Koleksi pendapatan
4. Pencatatan (akuntansi) pendapatan
5. Alokasi pendapatan.

Salah satu persoalan manajemen pendapatan adalah kebijakan penyeragaman sumber pendapatan. Ada beberapa daerah yang sebenarnya memiliki potensi hasil bumi, berupa pertanian dan perkebunan yang melimpah, tapi dalam desain kebijakannya mengabaikan potensi tersebut dan malah mendirikan berbagai pusat perbelanjaan dengan cara menggusur pertanian dan perkebunan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, antara lain :

1. Meningkatkan basis data untuk mengidentifikasi kembali semua wajib pajak.

2. Menggiringi wajib pajak untuk lebih taat membayar pajak dan retribusi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Atau memberikan *reward* kepada wajib pajak yang taat.
3. Perbaiki sistem akuntansi dalam proses penerimaan pendapatan, sebab sangat rawan kebocoran pada dinas-dinas terkait.
4. Meningkatkan sumber daya pegawai di dinas yang berhubungan dengan pendapatan untuk memaksimalkan kinerja mereka.³

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada bagian lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening untuk provinsi dan kabupaten / kota adalah berbeda. Pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten /

³ Abdul Halim dan Muhamad Ikbil, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit, 2012),28.

kota sesuai dengan undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.⁴ menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

1. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Objek pajak bea baliknama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor,

⁴ Abdul Halim dan Muhamad Ikbil, *Pengelolaan Keuangan Daerah*,... 97

termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

4. Objek pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air di permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan / atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau yang memanfaatkan air bawah tanah dan / atau air permukaan.

Selanjutnya jenis pajak kabupaten / kota tersusun atas:

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
2. Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

3. Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan
4. Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklem.
5. Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
7. Pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.⁵

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pmerintah Pusat dan Daerah Indonesia*,...59

tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagai mana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memertakan kesejahteraan masyarakat.⁶

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi berbeda untuk provinsi dan kabupaten / kota, terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Retibusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan

⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*,...63

3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi pelayanan pemakaman
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
7. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta
12. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14. Retribusi jasa usaha pasae grosir atau pertokoan
15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan

16. Retribusi jasa usaha terminal
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan / pesanggrahan / villa
19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
21. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
23. Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air
24. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
25. Retribusi jasa usaha penjualan produk usaha daerah
26. Retribusi izin mendirikan bangunan

27. Retribusi izin tempat penjualan
minuman beralkohol

28. Retribusi izin gangguan

29. Retribusi izin trayek

- a. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /BUMD.
2. Bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMD.
3. Bagi laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan

Besar kecilnya PAD yang dapat diterima oleh suatu kota akan sangat ditentukan oleh dua hal yaitu potensi penerimaan dan tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) setempat. Potensi PAD sangat ditentukan oleh perkembangan jumlah, ukuran dan kualitas objek pajak bersangkutan. Sedangkan tarif pajak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dengan memerhatikan perkembangan kebutuhan

pembangunan dan kemampuan keuangan wajib pajak yang terdapat pada kota bersangkutan.⁷

B. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lain selama menginap tersebut dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan atau perkantoran.

1. Objek Pajak Hotel

Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yaitu:

- a. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.

⁷ Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), 279

- b. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti social lainnya yang sejenis.
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Besarnya pajak hotel terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Sebagai contoh bila jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen (penyewa kamar) rata-rata pertahun sebesar Rp 1 miliar, dan tarif pajak hotel ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebesar 10% maka besar pajak teutang yang harus dibayar oleh pengusaha hotel ke Kas daerah setempat

adalah $10\% \times \text{Rp } 1 \text{ miliar} = \text{Rp } 100.000.000,-$ ⁸

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD/N merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan yang merupakan tentang daalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan dan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal

⁸ Darwin, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), 119

tersebut akan melakukan upaya intensifikasi dan eksentifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru.⁹

C. Pariwisata

1. Pngertian Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan dari suatu daerah kedaerah atau negara lain, pariwisata adalah semua proses yang ditimblkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar kesuatu negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan/minum, trasportasi, akomodasi dan objek atau hiburan.¹⁰

Istilah pariwisata belum dipahami banyak orang namun para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua

⁹ Cherrya Dhia Wenny, analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuanan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatra Selatan, (Universitas : STIE MDP, 1 September 2012), 42

¹⁰ Violetta Simatupang, *Pengantar Hukum Kepariwisataaan Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni Bandung, 2009), hal.30

suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan *wista* berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling.¹¹

Menurut UU RI NO.10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan

¹¹ Muljadi & Andri Wrman, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), 8

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.¹²

2) Tujuan Pariwisata

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa kepariwisataan sering kali dianggap sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi disuatu negara, namun kepariwisataan memiliki tujuan yang lebih luas bagi suatu negara, antar lain :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa

Kepariwisataan mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap negara melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya keseluruhan penjuru negri, sehingga dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul

¹² Novia Rabi'ul Insak, *Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Universitas: 17 Agustus 1945 Samarinda), 256

rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

2. Penghapusan kemiskinan (*poverty alleviation*)

Kepariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata akan mampu memberi adil, besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonominya selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

3. Pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*)

Kepariwisataan yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumber daya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi pariwisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pembangunan kepariwisataan di daerahnya.

4. Pelestarian budaya (*culture preservation*)

Kepariwisataan seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata dan upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya budaya atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka ditahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata

merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia

Kepariwisata telah menjadi kebutuhan dasar dan pokok dalam kehidupan masyarakat moderen. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak asai manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang.

6. Peningkatan ekonomi

Kepariwisata yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan

produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan pada industri lokal lainnya untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia (*world class*) dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

7. Pengembangan teknologi

Kepariwisata memiliki sifat yang kompleks dan ketatnya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan kesuatu destinasi pariwisata. Kebutuhan teknologi tinggi khususnya teknologi industri, akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini. Pada daerah-daerah tersebut akan menjadi pengembangan teknologi maju dan dapat guna

yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.¹³

3) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang di perlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) terdiri dari :

¹³ Muljdi dan Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 80-82

a. Objek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pengusahaan ini diselenggarakan oleh suatu badan usaha perseroan terbatas, atau koperasi dan perorangan.

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

Kegiatan objek dan daya tarik wisata alam, meliputi : 1) pembagngunan prasarana dan sarana lengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan. 2) pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada. 3) persediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam.

b. Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pengusahaan diselenggarakan oleh suatu badan usaha perseroan terbatas, atau koperasi dan perorangan.

Pengusahaan objek objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata : kegiatan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi : 1) pembangunan objek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, persarana, dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan. b) pengelolaan objek dan daya tarik wisata, termasuk sarana dan prasarana yang ada. c) penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap

objek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.¹⁴

D. Pengertian Wisatawan

Wisatawan yang berasal dari kata “wisata” maka sebenarnya tidaklah tepat bagi pengganti kata “*tourist*” dalam bahasa Inggris. Kata itu berasal dari kata sangsakarta : “wisata” yang berarti “perjalanan” yang sama atau dapat disamakan dengan kata “*travel*” dalam bahasa Inggris. Jadi orang yang melakukan dalam perjalanan dalam pengertian ini, maka “wisatawan” sama artinya dengan kata “*traveller*”, karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman pemakaian akhiran “wan” untuk menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, keadaannya, jabatannya, kedudukan seseorang.

Cohen mengklasifikasikan wisatawan atas dasar tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi,

¹⁴ Muljdi dan Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan.....*65-66

serta tingkat pengorganisasian perjalanannya. Atas dasar ini, Cohen menggolongkan wisatawan menjadi empat, yaitu :

1. *Drifter*, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya, berpergian dalam jumlah kecil.
2. *Explorer*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri, tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum (*off the beaten track*) Wisatawan seperti ini bersedia memanfaatkan fasilitas dengan setandar lokal dan tingkat interaksinya dengan masyarakat lokal juga tinggi.
3. *Individual Mass Tourist*, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanan kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal.

4. *Organizen-Mass Tourist*, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya ditempat tinggalnya, dan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata. Wisatawan seperti ini sangat terkungkung oleh apa yang di sebut sebagai *environmental bubble*.¹⁵

E. Pariwisata Dalam Islam

1. Definisi pariwisata

Pariwisata adalah suatu sistem yang mengikut sertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi dengan kaidah-kaidah syariah. Aktivitas pariwisata akan mendorong berlangsungnya dinamika fenomena mobilitas seluruh lapisan manusia sebagai penduduk satu tempat, untuk

¹⁵ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pngantar Ilmu Pariwisata...*
26-47

melakukan perjalanan sementara waktu secara sendiri-sendiri atau berkelompok, menuju tempat lain di dalam negeri atau di luar negeri. Mobilitas manusia berwisata dapat menggunakan transportasi darat, sungai, laut, atau udara. Keragaman minat wisata itu bertujuan untuk menikmati perubahan suasana; hiburan; keunikan keindahan alam atau seni budaya; atau terkait dengan kepentingan kesehatan; pariwisata olahraga; peningkatan politik; acara sosial atau keagamaan; dapat juga kegiatan wisata itu tergabung dengan dinas atau bisnis.¹⁶

Melakukan wisata dengan motif apapun tidaklah dilarang, apalagi untuk menikmati keindahan ciptaan Allah. Ini terkait dengan kegiatan tafkir dan zikir akan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan memperhatikan dan

¹⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 134

merenungkan ciptaan tersebut, seperti dalam Qur'an surat Al-Imran ayat 191 berikut ini:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ال عمران:)

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Al-Imran: 191).

2. Pariwisata dan Ekonomi Syariah

Dalam kesejahtraannya, pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam sebagai agama universal, yaitu ketika dikenal konsep *ziyarah*, yang secara harfiah artinya berkunjung. Dari budaya *ziyarah*, lahir berbagai bentuk pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya.

Selanjutnya, lahir konsep *dhiyah*, yaitu tata krama serta hukum hubungan sosial antar tamu (*dhaiif*) dengan tuan rumah (*mudhif*)

Ziyarah yang dapat juga kita artikan pariwisata atau tour dalam Islam, baik yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis dan sejumlah pandangan ulama, mengenal pula berbagai terminologi, seperti *assafar*, *arrihalah*. Istilah *rihlah* dijumpai dalam Al-Quran surat Al- Quraisy ayat 2:

إِنَّ لَّهُمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

“ (Yaitu) Kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas”. (Q.S Al-Quraisy: 2)

Rihlah dalam ayat ini mengandung pengertian perjalanan bisnis, yaitu orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Perjalanan yang mereka lakukan

bukan sekedar untuk berpariwisata, melainkan perjalanan untuk kegiatan bisnis.

Menurut Afzalurahman, pangsa pasar kaum Quraisy sampai ke wilayah siria, Turki, Bulgaria, Yunani, Eropa Timur, Yaman, Oman atau bekerja sama dengan para pedagang Cina, India dan singgah di Pelabuhan Aden.

Profesi yang dipilih oleh orang-orang Quraisy sebagai seorang pembisnis dilatarbelakangi oleh kondisi jazirah Arab yang kering, susah air, dan tidak kondusif jika jika menjadi petani atau peternak. Oleh karena itu, mereka lebih memilih profesi sebagai seorang pembisnis daripada profesi sebagai petani atau peternak.¹⁷

Prinsip pembangunan pariwisata diarahkan pada penciptaan perdamaian dunia ketika

¹⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,...140

pariwisata dari lintas negara dipertemukan oleh ragam keindahan yang diberikan Allah. Pertemuan antarwisata akan memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat lokal. Jika dikelola dengan baik, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ankabut ayat: 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ
الْحَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi." Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Ankabut: 20)

Jika melihat ayat di atas pada hakikatnya aktivitas berpergian atau aktivitas pariwisata dalam Islam sebenarnya tidak hanya untuk memenuhi

kepuasan secara jasmani, tetapi harus memiliki nilai ekonomis.¹⁸

F. Landasan Teori Pajak Menurut Syariat

Menurut Qardhawi, asas teori wajib pajak dan zakat adalah sebagai berikut:

1. Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmat-Nya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka, dan untuk menguji apa yang di hati mereka, agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya, dan siapa yang membangkang,

¹⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,...141

sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, mana yang jahat mana yang baik, kemudian Allah membalas amal perbuatan mereka.

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

“Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”(QS. Al-Mukminun:115)

Teori pertama ini, pendekatannya adalah dari sisi manusia sebagai makhluk, yang dapat diperintah oleh sang Khaliq, diuji, diberi tanggung jawab, dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan sang khaliq

2. Teori Khilafah

Teori kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini bahwa itu semua adalah kepunyaan Allah SWT, dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta

itu. Allah-lah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad raya ini.

Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah, ia harus mengeluarkan sebagian Rizkinya itu untuk tujuan dijalan Allah, meninggikan Rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur segala atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.¹⁹

Pendapatan distribusi merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maka Islam memperhatikan sebagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual

¹⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 204-205

beli, hutang piutang, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam.

1. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara yang satu dengan yang lain, karena antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain. Tidak ada upaya untuk membatasi optimalisasi distribusi pendapatan didalam masyarakat dengan perbuatan-perbuatan tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan sebagainya sehingga timbul ketakutan, ketidakpercayaan, dan

kecurigaan antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Seorang muslim akan menghindari praktik distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat, misalnya minuman keras, obat terlarang, permpajakan, dan sebagainya sebagai media distribusi. Dalam Islam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.
3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan.
4. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti; sekolah, rumah

sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya.²⁰

G. Pengaruh Wisatawan yang Menginap Terhadap Penapatan Pajak Hotel

Pengaruh wisatawan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), semakin lama wisatawan tinggal disuatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara nmaupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata disuatu daerah juga akan semakin meningkat.

Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung kepada wisatawan yang menginap.

²⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Codong Catur : 2004),249

Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negeri. Semakin banyaknya wisatawan berkunjung makamemberi dampak yang positif bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama sebagai sumber pendapatan daerah.

Namun wisatan yang banyak jumlahnya belum tentu menjamin bahwa perolehan devisa akan menjadi banyak pula. Jumlah kunjungan wisatawan domestik berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, faktor yang paling menentukan adalah pengeluaran wisatawan itu sendiri. Semakin banyak uang yang dibelanjakan dinegara tersebut semakin banyak devisa yang diterima negara.²¹

²¹ Novi Dewi Purwanti dan Retno Mustika Dewi, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisataawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013*, (Universitas Negeri Surabaya : 2014), 4

H. Hubungan Antar Variabel

Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang menginap banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. pekerjaan di sektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen, perjalanan, penyediaan jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia *souvenir*, atraksi wisata, dan seterusnya.

Pendapatan dari hasil kerja di usaha pariwisata merupakan dampak sekunder sedangkan dampak primernya berupa pendapatan bisnis organisasi atau perusahaan serta pendapatan devisa negara. Bagi

perusahaan, pendapatan primer inilah yang dipakai untuk membayar gaji dan upah pekerjaanya, serta berupa deviden bagi pemilik usaha.²²

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. hal ini akan meningkat sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi.

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	No Nama	Judul	Hasil
1	Betty Rahayu (Universitas Diponegoro Semarang,	Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak sangat besar, jauh diatas nilai realisasi

²² I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pngantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2009),186

	2011)	Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul.	penerimaan pajak hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektifitas pajak hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005-2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. ²³
2	Siti Yumsinah (UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan	Berdasarkan hasil data yang dianalisis, jumlah wisatawan berpengaruh pada pendapatan asli

²³ Betty Rahayu, *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul*, (Universitas: Diponegoro, 2011).

	Banten, 2017)	Asli Daerah (PAD) 2005- 2015	daerah di kabupaten pandeglang tahun 2005-2015. Dilihat dari nilai korelasi yang didapatkan bahwasannya tingkat hubungan yang dimiliki antara variabel bebas yakni jumlah wisatawan dengan variabel terikat yakni pendapatan asli daerah di kabupaten pandeglang sangat kuat yaitu sebesar 0,851. Dan nilai R square sebesar 0,723, yang artinya variabel bebas (jumlah
--	------------------	------------------------------------	---

			wisatawan) mempengaruhi variabel terikat (PAD) sebesar 72,3 % dan sisanya 27,7 % yang di pengaruhi oleh variabel lain diantaranya pajak daerah, kekayaan hasil bumi, bagian laba BUMD dan lain sebagainya. ²⁴
3	Novia Rabi'ul Insak, (Universitas Samarinda, 2014)	Pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel. Adapun besaran presentase pengaruh

²⁴ Siti Yumsinah, *Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2015*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017), 64

		<p>(PAD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara</p>	<p>pendapatan sektor Pariwisata erhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 24,3 % dan signifikan. Dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p><i>a. H₀</i>: Persentase pengaruh pendapatan sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kutai</p>
--	--	---	--

			<p>Kartanegara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 semakin meningkat.</p> <p><i>b. H₁</i>: Persentase pengaruh pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 semakin</p>
--	--	--	---

			menurun. ²⁵
4	Nirmala Bani, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)	Analisis Pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2009 hingga tahun 2015 variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah biro perjalann wisata secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di Nusa tenggara Barat. Nilai koefisien determinasi

²⁵ Novia Rabi'ul Insak, *Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Universitas: 17 Agustus 1945 Samarinda).

			<p>yang diperoleh sebesar 93,75%. Artinya bahwa variabel independen (jumlah obyek wisata jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah biro perjalanan wisata) mampu menjelaskan variabel dependen (pendapatan asli daerah) sebesar 93,75% sedangkan 6,25% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.²⁶</p>
--	--	--	---

²⁶ Nirmala Bani, *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Nusa Tenggara Barat*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

5.	Daus Syamsu (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017)	pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan retribusi sektor pariwisata.	Hasil data yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai t hitung sebesar 4,447, nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 2,039. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel antara jumlah kunjungan wisatawan (X)
----	--	--	--

			<p>dengan variabel pendapatan retribusi sektor pariwisata (Y).²⁷ Serta dari hasil uji koefisien determinasi didapat nilai R Square Koefisien Determinasi sebesar 0,389 yang artinya 38,9% dan sisanya 61,1% yang dipengaruhi faktor lain diluar penelitian seperti penggunaan fasilitas berupasaung (gazebo), perahu, dan warung atau</p>
--	--	--	--

²⁷ Daus Syamsu, *pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan retribusi sektor pariwisata*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

			pedagang yang berada dilokasi obyek wisata.
--	--	--	---

J. Hipotesis

Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Dikatakan sementara, karena jawaban-jawaban yang diberikan berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis ini mempunyai bentuk dasar atau memiliki *statement* yang menyatakan adanya hubungan antar variabel indeviden (X) dan Variabel dependen (Y) yang akan diteliti.

H_0 : Wisatawan yang menginap tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak hotel

H^a : wisatawan yang menginap memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak hotel